



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Analisis Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap pembentukan Etika Profesional Dan Tanggung Jawab Sosial calon Apoteker Di Indonesia

Zamil Hukmi, Benedicta Natasya Febriana Rahayu, Fadila Sukmawati, Syafaatun Muthia, Desna Auliya Khhairiyatin

¹Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, zamilhukmi5@gmail.com

²Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, benedictanatasya969@gmail.com

³Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dsnauliya18@gmail.com

⁴Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, fadilasukmawati0206@gmail.com

⁵Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia mutiaa8383@gmail.com

Abstrak: Tujuan pendidikan tinggi di Indonesia adalah pengembangan manusia seutuhnya, mencakup penguasaan kompetensi teknis dan pembentukan karakter, moralitas, serta tanggungjawab sosial. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berposisi strategis sebagai wahana pembinaan kepribadian dan nilai kebangsaan mahasiswa. Dalam profesi kesehatan seperti apoteker, tanggungjawab etis dan sosial sangat integral karena konsep "obat sebagai amanah" menuntut tanggung jawab moral terhadap keselamatan pasien dan masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman materi PKn dengan penerapan nilai karakter sehari-hari, serta ditemukannya tantangan etis dalam praktik kefarmasian, seperti kurangnya pemenuhan hak pasien dan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi PKn dalam pembentukan etika profesional dan tanggung jawab sosial calon apoteker di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (studi literatur) dengan menganalisis sumber ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PKn secara strategis memfasilitasi internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan seperti kejujuran, keadilan, dan integritas. Nilai-nilai ini menjadi fondasi etika profesional calon apoteker, yang ditopang oleh prinsip *respect for autonomy, non-maleficence, beneficence, dan justice*. Etika profesional yang kuat menuntut kesadaran moral dan komitmen sosial yang tinggi. Dengan penanaman nilai yang sistematis (mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan moral), PKn mempersiapkan calon apoteker untuk menghadapi tantangan profesional dan berperan sebagai agen perubahan di masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Etika, Tanggung Jawab, Apoteker, Moralitas

***Correspondence Address:** zamilhukmi@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	11/14/2025 1:35:00 AM		9/30/2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Mengetahui dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia, selain penguasaan kompetensi akademik teknis, juga diharapkan adanya pembentukan karakter, moralitas, dan tanggung

jawab sosial sebagai bagian dari pengembangan manusia seutuhnya (Widiatmaka & Purwoko, 2021). Salah satu mata kuliah yang secara formal menduduki posisi strategis dalam tujuan tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn di perguruan tinggi berperan sebagai wahana pembinaan kepribadian, nilai kebangsaan, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan kesadaran kolektif mahasiswa sebagai warga negara dan calon profesional (Baynal Hubi et al., 2022; Astuti et al., 2023). Dalam konteks kemajuan bangsa yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, arus globalisasi, dan digitalisasi, pembentukan karakter melalui PKn menjadi semakin penting sebagai upaya menjaga integritas, identitas nasional, dan tanggung jawab warga negara (Widiatmaka et al., 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mata kuliah yang menjadi salah satu strategi untuk membangun karakter, menumbuhkan nilai moral dan tanggung jawab, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, cerdas, beriman dan bertakwa. Pendidikan karakter melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) wajib diimplementasikan pada setiap jenjang sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 pasal 37 bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat kewarganegaraan agar dapat membangun karakter pemuda (Widiatmaka, 2022). Implementasi PKn di perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa PKn di perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter yang berlandaskan moral, religiusitas, dan kesadaran hukum (Sulkipani, 2017).

Dalam ranah profesi kesehatan, khususnya profesi apoteker, tanggung jawab etis dan sosial merupakan bagian integral dari praktik kefarmasian. Apoteker bukan hanya menjalankan tugas teknis seperti penyediaan obat dan pelayanan farmasi, tetapi juga memikul tanggung jawab moral terhadap keselamatan pasien dan masyarakat luas (Emilia, 2023). Selain itu, nilai-nilai kewarganegaraan mengambil peran penting dalam membentuk etika profesional, terutama calon apoteker yang kedepannya akan terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan (Yuliati, 2021). Sebagai calon tenaga kesehatan, mahasiswa farmasi dituntut untuk memiliki kesadaran etis dan sosial agar dapat menjalankan perannya. Dalam praktek di Indonesia, profesionalisme apoteker dikaitkan dengan konsep “obat sebagai amanah”, yakni pengobatan dan pelayanan obat bukan semata komoditas ekonomi tetapi mandat moral yang harus dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas (Emilia, 2023). Faktor-faktor seperti komersialisasi layanan kefarmasian, tekanan pasar, dan perubahan regulasi memperkuat urgensi internalisasi nilai-nilai profesional dan sosial sejak tahap pendidikan (Hamdani & Purwaningsih, 2021; Sulistyaningtyas et al., 2023).

Sedangkan, penelitian mengenai PKn di perguruan tinggi menunjukkan bahwa meskipun banyak mahasiswa telah menerima pengetahuan dan materi pembelajaran PKn, implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal (Hikmah, 2020; Baynal Hubi et al., 2022). Sebagai contoh, studi oleh Hikmah (2020) mengungkapkan bahwa mahasiswa sudah memahami materi PKn, tetapi penerapan nilai karakter akibatnya masih sangat terbatas dalam aktivitas sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan adanya gap antara pengajaran dan internalisasi nilai. Sementara itu, dalam profesi apoteker di Indonesia ditemukan adanya tantangan etis seperti kurangnya pemenuhan hak pasien, pelanggaran kode etik, dan tanggung jawab sosial yang belum maksimal (Hamdani & Purwaningsih, 2021; Sulistyaningtyas et al., 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya mendukung adanya keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan, etika profesional, dan tanggung jawab sosial seperti penelitian yang dilakukan oleh Widiatmaka (2022) yang menunjukkan peran signifikan PKn dalam membangun karakter bangsa dan penelitian oleh Yuliati (2021) yang menggambarkan bahwa internalisasi nilai-nilai PKn berdampak langsung pada pembentukan perilaku profesional mahasiswa. Selanjutnya, Candra & Fathurohman (2025) melakukan penelitian terkait profesi

apoteker dan penerapan etika profesi dan Ilhami et al., (2025) melakukan penelitian yang menunjukkan pentingnya tanggung jawab sosial mahasiswa. Dengan demikian, relevansi PKn terhadap pembentukan etika profesional dan tanggung jawab sosial calon apoteker menjadi suatu tema yang sangat penting untuk diteliti. Etika profesi merupakan salah satu etika sosial yang berkaitan dengan bagaimana seseorang harus menjalankan profesinya secara profesional agar dapat diterima oleh masyarakat umum. Dalam bidang kefarmasian, etika profesional berperan sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan yang mengarah pada keselamatan pasien dan kesejahteraan masyarakat (Candra & Fathurohman, 2025). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan terkait etika profesi dan penerapannya, seperti kurang konsisten dalam menjaga integritas profesi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan etika yang berfokus pada nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme sangat penting untuk diberikan sejak mahasiswa menjalani pendidikan tinggi. PKn dapat memfasilitasi internalisasi nilai-nilai kewargaan seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab kolektif, dan integritas, yang kemudian dapat menjadi fondasi etika profesional dalam praktik kefarmasian. Jika nilai-nilai tersebut tertanam secara kuat sejak pendidikan tahap awal, maka calon apoteker akan lebih siap untuk menghadapi tantangan profesional seperti konflik kepentingan, tekanan komersial, maupun tanggung jawab sosial terhadap pasien dan masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendidikan kewarganegaraan (PKn) dapat berkontribusi dalam pembentukan etika profesional dan tanggung jawab sosial calon apoteker di Indonesia, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Analisis ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengembangan kurikulum pendidikan farmasi, penguatan metode pembelajaran PKn, dan peningkatan kesiapan profesional kandidat apoteker dari sisi karakter dan tanggung jawab sosial.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada kajian pustaka atau studi literatur (*literature review*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal nasional, buku teks, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan etika profesi apoteker. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang dapat menjelaskan relevansi antara pendidikan kewarganegaraan, pembentukan etika profesional, dan tanggung jawab calon apoteker di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena lebih efektif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, memaksimalkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik moralitas profesi, pendidikan karakter, serta profesionalisme dalam bidang kefarmasian (Synder, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

A. Krisis Moral dan Tantangan Generasi Milenial

1. Krisis moral : *Cyber bullying*, *cyber crime*, dan pelecehan seksual

Krisis moral menjadi tantangan utama mahasiswa di era milenium. Generasi milenial yang hidup di tengah kemajuan teknologi menghadapi berbagai persoalan etika seperti kurangnya empati, meningkatnya *cyber bullying*, kesenjangan nilai, dan ketidakjujuran. Sebagai agen perubahan, mereka perlu memahami dan mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan untuk membentuk karakter dan etika yang kuat (Dewi, Arianto, & Supentri, 2022). Banjir informasi di era globalisasi juga mudah mengganggu moral remaja bila tidak disaring dengan bijak. Salah satu bentuk penyimpangan yang marak adalah perjudian online, yang termasuk *cyber crime* karena menggunakan internet sebagai media tindak pidana. Fenomena ini diperparah

oleh meningkatnya kasus pelecehan seksual di bawah umur (Zainudin Hasan, 2023).

2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Solusi dari Tantangan Generasi Milenial

Krisis moral yang terjadi bertentangan dengan norma agama, moral Pancasila, dan membahayakan masyarakat. Dalam situasi ini, pendidikan kewarganegaraan berperan penting membentuk individu yang bertanggung jawab, sadar sosial, dan beretika (Muhsinin., 2023). PKn membekali mahasiswa untuk memahami hal-hal mendasar dalam negara yang berdaulat dan menanamkan nilai kepemimpinan (Afriзал & Najicha, 2022). Dengan memahami peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi krisis moral, kita dapat mengidentifikasi cara yang tepat untuk mengamalkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam pendidikan dan mempersiapkan generasi milenial untuk menjalani masa depan yang penuh tantangan dengan moralitas dan integritas yang kuat.

B. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter dan Tanggung Jawab Sosial

Menurunnya nilai moral dan sosial generasi muda kini tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial (Pertiwi & Dewi, 2022). Fenomena kebebasan seksual yang berlebihan menimbulkan risiko kehamilan tidak diinginkan, HIV/AIDS, dan dampak psikologis, yang disebabkan rendahnya pengetahuan serta perilaku seksual berisiko. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu ditanamkan agar generasi muda menjadi warga negara yang kritis, sadar hak dan kewajiban, toleran, cinta damai, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan warga negara menjadi warga negara yang cerdas untuk memahami dan menjaga eksistensi negara dan bangsa agar tetap kokoh sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, adil dan makmur dalam kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka setiap individu perlu mempunyai komitmen, koneksi dan dukungan yang serius. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk diberikan agar peserta didik menjadi individu yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, memiliki pemikiran kritis, menunjukkan toleransi yang tinggi, dan cinta damai, memahami dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional (Sari *et al.*, 2024). Solusi menghadapi dekadensi moral, menurut Oktaviana & Dewi (2022), meliputi: (a) penanaman pendidikan karakter sejak dini, (b) pemilihan lingkungan pergaulan yang tepat, dan (c) pemanfaatan IPTEK secara bijak dan benar.

C. Mahasiswa Farmasi sebagai Agen Perubahan

Mahasiswa farmasi, sebagai calon tenaga medis memikul tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki pemahaman mendalam tentang etika, moral, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga berintegritas dan berempati pada tugas yang dijalani. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting sebagai dasar pembentukan karakter, mengajarkan penghargaan terhadap keragaman, serta menumbuhkan sikap toleran dan saling menghormati. Dengan demikian, tenaga kesehatan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga peka terhadap kebutuhan sosial masyarakat (Pintubatu *et al.*, 2025). Tenaga kesehatan masyarakat dengan wawasan bela negara mampu berkontribusi bagi terwujudnya kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat dan kesehatan nasional. Nilai-nilai dasar dalam bela negara yang dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat sejalan dengan fungsi luhur sebagai tenaga kesehatan yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memiliki kompetensi untuk

melakukan upaya kesehatan. Menghadapi tantangan kesehatan di masa depan, diperlukan penguatan regulasi, percepatan pemberdayaan tenaga kesehatan, serta kerja sama lintas sektor dan pengelolaan berjenjang dari pusat hingga daerah (Pintubatu *et al.*, 2025).

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk mahasiswa sebagai *agent of change*, tidak hanya sebagai penggagas perubahan melainkan sebagai pelaku nyata dalam proses perubahan. Sikap kritis mahasiswa menjadi pendorong utama terwujudnya perubahan positif di masyarakat. Melalui peran dan fungsinya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat mencetak mahasiswa yang membawa perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai calon apoteker, mahasiswa farmasi memiliki peran penting sebagai *agent of change* yang tidak hanya berpikir kritis terhadap masalah kesehatan di masyarakat, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya perubahan menuju pelayanan kefarmasian yang lebih baik. Sikap kritis tersebut misalnya ditunjukkan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada penggunaan obat rasional, pengembangan obat tradisional berbasis bahan alam, atau edukasi tentang bahaya penyalahgunaan obat. Dalam menjalankan peran ini, mahasiswa tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila seperti tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24 ayat (1) dan (2), yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk mematuhi kode etik, standar profesi, dan hak pengguna pelayanan kesehatan. Dengan demikian, mahasiswa farmasi sebagai calon apoteker tidak hanya menjadi penggagas perubahan, tetapi juga pelaku nyata dalam membangun pelayanan kesehatan yang etis, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Simamora *et al.*, 2025).

D. Etika dan Profesionalisme dalam Praktik Kefarmasian

Etika profesional dalam bidang kefarmasian merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas layanan kesehatan. Etika farmasi didefinisikan sebagai sekumpulan konsep moral yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan praktik seorang apoteker. Selain berpegang pada kode etik profesi, apoteker juga wajib mematuhi empat prinsip utama etika kesehatan, yaitu *respect for autonomy*, *non-maleficence*, *beneficence*, dan *justice* (Amanta & Da'i, 2024). Implementasi prinsip-prinsip ini mendorong apoteker untuk menjaga keselamatan pasien, melindungi hak serta kerahasiaan informasi pasien, memastikan bahwa penggunaan obat memberikan manfaat, serta menjamin keadilan akses terhadap pelayanan kefarmasian. Penerapan etika ini dapat dilakukan melalui pengawasan keamanan, efektivitas, dan ketersediaan obat, serta penguatan kepatuhan pada hak-hak pasien (Javadi *et al.*, 2018). Implementasi etika secara konsisten terbukti mengurangi risiko pelanggaran etik dalam praktik kefarmasian dan mendorong pelayanan yang lebih aman dan berkualitas (Delpasand *et al.*, 2018). Oleh karena itu, etika profesi yang kuat menuntut adanya pengetahuan mendalam serta kesadaran moral yang tinggi dari setiap calon apoteker (Pratiwi *et al.*, 2017).

Profesionalisme dalam bidang kefarmasian tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen moral terhadap tanggung jawab sosial. Apoteker sebagai penjaga mutu obat memiliki kewajiban besar dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang etis dan profesional (Emilia, 2025). Dalam konteks nasional, permasalahan karakter bangsa yang dipengaruhi oleh kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan degradasi moral menuntut hadirnya tenaga profesional yang berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Nilai Pancasila menjadi pedoman etis dalam pelayanan kesehatan yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kemanusiaan (Husni *et al.*, 2024). Hal ini menegaskan bahwa etika profesional apoteker tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar bangsa yang bersumber dari Pancasila.

E. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Fondasi Moral dan Etika Profesional Calon Apoteker

1. Peran PKn dalam membangun fondasi profesionalisme

Dalam rangka membentuk profesionalisme berkarakter, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai lembaga pembentuk moral, karakter, dan identitas kewarganegaraan mahasiswa. Pembentukan karakter dilakukan melalui penanaman nilai akademik (sikap ilmiah, kejujuran akademik) dan non-akademik (wawasan kebangsaan, tanggung jawab sosial) (Hunaina *et al.*, 2024). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi instrumen penting dalam membentuk moral mahasiswa khususnya sebagai calon tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab. PKn tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga membina kesadaran etika, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari karakter kewarganegaraan (Nurpratiwi, 2021; Hunaina *et al.*, 2024). Dalam konteks tenaga kesehatan, PKn memiliki peran strategis dalam membangun fondasi profesionalisme melalui penguatan nilai kebangsaan, moralitas, kedisiplinan, integritas, dan kesadaran hukum. Pendidikan ini membentuk sikap bertanggung jawab dalam pelayanan publik, terutama ketika calon tenaga kesehatan berhadapan dengan masyarakat yang beragam secara sosial, ekonomi, maupun budaya (Helen *et al.*, 2025). Penanaman nilai-nilai kewarganegaraan di tingkat pendidikan tinggi terbukti memiliki dampak positif terhadap sikap tanggung jawab sosial mahasiswa (Hardiyanto *et al.*, 2023). Oleh karena itu, PKn dapat menjadi pondasi etik dan moral yang memperkuat sikap profesional calon apoteker sebagai bagian dari warga negara yang berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat.

2. Integrasi Nilai Pancasila dalam Etika Profesi Apoteker

Integrasi nilai Pancasila dalam etika profesi kesehatan berperan dalam memperkuat ketahanan moral tenaga medis, terutama dalam menghadapi dilema etik yang menyangkut keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan publik (Manurung *et al.*, 2025). Melalui pemahaman nilai-nilai kebangsaan, mahasiswa kesehatan dilatih untuk mengambil keputusan profesional secara adil dan manusiawi. Pembelajaran PKn juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran terhadap sistem kesehatan nasional, kebijakan publik, serta tanggung jawab sosial tenaga kesehatan dalam membangun pelayanan yang merata dan inklusif (Pintubatu *et al.*, 2025). Dengan demikian, PKn dapat memperkuat kepemimpinan sosial calon apoteker sebagai agen perubahan dalam sistem kesehatan.

3. Karakter Pembentuk Profesionalisme Calon Apoteker

Karakter profesional calon apoteker tidak hanya dibentuk melalui kode etik profesi, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Kesadaran hukum dan etika profesi hanya dapat terwujud apabila mahasiswa memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan sejak masa pendidikan (Widjaja *et al.*, 2025). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Khairah, M., *et al.* (2024) yang menekankan pentingnya *civic disposition* atau sikap kewarganegaraan seperti tanggung jawab, empati, kerjasama, dan kepedulian sosial dalam membangun karakter warga negara yang bermoral dan beretika. Oleh karena itu, PKn berperan sebagai pilar pembentuk etika profesional dan tanggung jawab sosial calon apoteker, sehingga mereka tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga bermoral, nasionalis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Branson (1998) dalam Pintubatu *et al.* (2025) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda. Sekarang ini nilai-nilai kemanusiaan pada

dunia medis sudah merosot dengan indikator begitu banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi terhadap pasien dan dalam lingkungan rumah sakit banyak dijumpai tenaga keperawatan yang kurang beretika. Hal ini sangat relevan bagi calon apoteker, karena profesi apoteker tidak hanya menuntut kemampuan ilmiah dalam bidang farmasi, tetapi juga kepekaan sosial, moral, dan kemanusiaan dalam melayani pasien. Di tengah maraknya kasus pelanggaran hak asasi pasien dan menurunnya nilai-nilai kemanusiaan di dunia medis, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk calon apoteker yang beretika, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai PKN seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama bagi calon apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi dari nilai pendidikan kewarganegaraan yang dapat dicerminkan oleh calon apoteker ialah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan edukasi terkait penyuluhan obat, pemberian informasi obat, konseling, dan pemeriksaan kesehatan.

4. Nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam Lulusan Farmasi yang Kompeten

Nilai-nilai dari Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan erat dengan kompetensi lulusan farmasi, yang meliputi aspek sikap, etika, dan tanggung jawab sosial di bidang farmasi. Lulusan farmasi diharapkan memiliki integritas moral, menjunjung tinggi etika profesi, dan berkomitmen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, sebagai bekal mendasar bagi seorang calon apoteker. Melalui pembelajaran PKN, mahasiswa farmasi tidak hanya dibekali dengan pengetahuan mengenai peraturan dan kewajiban warga negara, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang reflektif, empatik, dan sadar akan tanggung jawab sosialnya sebagai tenaga kesehatan. Pembelajaran tentang kewarganegaraan dapat menanamkan kesadaran etis dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional yang dimiliki seorang apoteker. Dengan demikian, PKN menjadi fondasi penting dalam membentuk apoteker yang berintegritas, berkemanusiaan, dan bertanggung jawab secara moral dan sosial.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran penting dalam membentuk etika profesional dan tanggung jawab sosial calon apoteker di Indonesia. Melalui internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, PKN dapat menjadi fondasi bagi pembentukan karakter yang kuat dan profesionalisme dalam praktik kefarmasian. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta praktik profesi. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan sistematis dalam kurikulum pendidikan farmasi yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan moral untuk memperkuat pembentukan etika profesional dan tanggung jawab sosial mahasiswa calon apoteker.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Artikel ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen dan pembimbing di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan berharga selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut berdiskusi dan berbagi referensi terkait topik pendidikan kewarganegaraan dan profesionalisme apoteker. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada pengelola jurnal dan

peneliti terdahulu yang karya ilmiahnya menjadi sumber referensi penting dalam memperkaya analisis dan pembahasan dalam artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan akademik dan praktik pendidikan kewarganegaraan di bidang kesehatan, khususnya dalam membentuk etika profesional dan tanggung jawab sosial calon apoteker di Indonesia.

REFERENSI | REFERENCE

- Afrizal, M. N., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Kalangan Mahasiswa Pada Zaman Millenial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1)
- Amanta, C. V. & Da'i, M. (2024). Pengetahuan Etika dan Penerapan Praktik Apoteker di Kabupaten Sragen. *Usadha: Journal of Pharmacy*, 3(4), 384-394.
- Astuti, A. P., Nuryah N., Khumaira, K. B., & Sidik, O. A. (2023). Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1(No. 5).
- Baynal Hubi, Z., Mulyani, H., Sapriya, A., Abdulkarim, A., & Nurgiansah, T. (2022). Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kuliah Pengembang Kepribadian dan Karakter di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Delpasand K., Kiani M., Afshar L., Tavakkoli S.N., Farshad S. & Shirazi H. (2018). Extracting the Ethical Challenges of Pharmacy Profession in Iran, a Qualitative Study, *Journal of Research in Medical and Dental Science*, 6(1), 52–58.
- Dewi, N., Arianto, J., & Supentri, S. (2022). Pengaruh Pembelajaran Ppkn Dalam Membentuk Karakter Kewarganegaraan Siswa/I Di Sma Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 7(1).
- Emilia, M. (2023). Profesionalisme Apoteker dalam Perspektif Nilai Obat sebagai Amanah pada Teori Konstitusi Kesehatan Nusantara. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 4(1).
- Hamdani, U. N., & Purwaningsih, S. B. (2021). Enforcement of the Code of Ethics of Pharmacist Profession in Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 13.
- Hardiyanto, L., Khodijah, S., & Fitri, D. M. (2023). Penanaman Kompetensi Kewarganegaraan Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Mahasiswa di Stikes Mitra Ria Husada Jakarta, *Edum Journal*, 6(2), 32-43.
- Hasan, Z., Annisa, I., Hafizha, A.R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2).
- Helen, Sally, Cinta & Rachel. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pondasi Pembentukan Karakter Profesional Tenaga Kesehatan, *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(7), 1-11.
- Hikmah, S. N. (2020). Meninjau Sejauh Mana Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).

- Hunaina, N., Calillah, D. M., Sofia, Hasanah, J., Cholisatun, A., Nurjanah, S., Putri, S. N., Sasmita L., Pratsila, A. D., Waufa, W. F., Margareta, M., Putri, A. C. & Suyono. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Krisis Moral di Era Milenial Mahasiswa Farmasi Universitas PGRI Adi Buana, *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 38-49.
- Husni, N. A., Amalia, A., Munatunnisa, H., Saputri, W. N. & Widyaningsih, S. (2024). Pancasila sebagai Fondasi Etika dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 101-107.
- Javadi, M., Ashrafi, N. & Salari, P. (2018). Assessment of Pharmacists Experiences and Attitudes Toward Professionalism and its Challenges in Pharmacy Practice, *Iranian Journal of Pharmacy Research*, 17(1), 168-177.
- Khairah, M., Mustari, M., Kurniawansyah, E. (2024). Penguatan Civic Disposition melalui Tradisi Mbolo Weki pada Masyarakat Suku Mbojo Studi di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 4037-4047
- Manurung, A. J., Sijabat, A. S., Situmorang, A. S., Simorangkir, B. G. T., Rumabutar, B.R., Daeli, F., & Sitohang, B. S. (2025). Integrasi Nilai- Nilai Pancasila Dalam Etika Profesi Kesehatan. *Jurnal Penelitian Ilmu Kesehatan*, 1(1), 82-87
- Muhsinin, A. N., Parizal, F., Rohmatulloh, R., & Mila, S. H. (2023). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Dan Moral Mahasiswa. *Advanced In Social Humanities Research*, 4(1)
- Nurpratiwi, H. (2021). Membangun Karakter Mahasiswa Indonesia Melalui Pendidikan Moral, *Jipsindo*, 8(1), 29–43. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i1.38954>
- Pertiwi, P. I., & Dewi, D. A. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Warga Negara Indonesia Konstruksi Sosial: *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 6(2)
- Pintubatu, D. Y., Sialoho, B. V., Hutagalung, M. A., Zega, M. K., Sembiring, N., Viona, S. & Sitohang, B. S. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dan Peran Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, *Jurnal Penelitian Ilmu Kesehatan*, 1-7
- Pratiwi W.R., Kautsar A.P. & Gozali D. (2017). Hubungan Kesesuaian Penulisan Resep dengan Formularium Nasional Terhadap Mutu Pelayanan pada Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum di Bandung, *Pharmacy Science Research*, 4(1), 48-56.
- Sari, I.P., Pasaribu, I.W., Akbar, M. A.Z., & Octanelsha, B.C. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Moral Generasi Milenial Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 2(5), 751–759.
- Simamora, A., Bulolo, A., Malau, M., Sitompul, S., Sihombing, S. E., Sianturi, S., & Sitohang, B. S. (2025). Tanggung Jawab Etis Mahasiswa Kesehatan: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Penelitian Ilmu Kesehatan*, 68-74.

Sulistyaningtyas, D. S., Yulia, R., & Al Arif, M. N. F. (2023). Patients' Rights Fulfillment towards Medicines Information Services; Law Enforcement and Pharmacist Criminal Liability. *International Journal of Social Sciences Review*, 3(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Widjaja, G., Sijabat, H. H., & Dhanudibroto, H. (2025). Kepatuhan Tenaga Kesehatan Terhadap Kode Etik Profesi: Analisis Literatur Undang- Undang dan Praktek di Lapangan, *Zahra: Journal of Health and Medical Research*, 5(2), 55-67.